

PENERAPAN DAN PERSPEKTIF OPEN GOVERNMENT DATA (OGD) DI BEBERAPA NEGARA: PENDEKATAN LITERATUR

Retnowati¹, Daniel Herman Fredy Manongga², Hari Sunarto³

¹ Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank; Mahasiswa Doktorat Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

² Program Studi Magister Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana

³ Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
e-mail: ¹retnowati@edu.unisbank.ac.id, ²danny.manongga@staff.uksw.edu, ³hari.sunarto@staff.uksw.edu

ABSTRAK

Open Government Data (OGD) merupakan suatu terobosan konsep pengelolaan pemerintahan yang telah menjadi isu Internasional. Kesadaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (RTI: Right to Information) telah menjadi sebuah pemahaman universal yang harus ditindaklanjuti. Dengan demikian, Pemerintah sebagai badan publik harus mampu mengelola informasi dan memberikan hak masyarakat tersebut melalui implementasi OGD. Keterbukaan terhadap data dan informasi merupakan sebuah keniscayaan, tetapi sekaligus memberikan banyak tantangan dan hambatan. Artikel ini merupakan survey melalui data sekunder, terhadap perspektif dan implementasi OGD di berbagai negara termasuk Indonesia. Survey ini merupakan langkah awal terhadap penggalan potensi model pengelolaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hasil survey menunjukkan bahwa hampir seluruh negara di dunia mengakui, menyadari dan menyetujui penting dan manfaat serta keuntungan penerapan OGD, termasuk Indonesia dengan Open Government Indonesia (OGI). Prinsip-prinsip OGD sekalipun tidak selalu sama dalam pemilihan kata, tetapi hampir semua memiliki konteks pemahaman yang relatif sama. Di sisi lain, penerapan OGD juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa perspektif antara lain kelembagaan, teknologi serta regulasi.

Kata Kunci: OGD, Perspektif OGD, Prinsip OGD

1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia dihadapkan pada realitas terhadap keterbukaan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk keterbukaan terhadap data dan informasi. Era keterbukaan atau sering pula disebut dengan *freedom of information (FOI)* memberikan konsekuensi bagi pemerintah di manapun untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dengan baik, tidak terkecuali layanan terhadap kebutuhan data dan informasi. Hak masyarakat atas informasi sering disebut dengan *Right to information (RTI)*. Dari perspektif pemerintah, informasi harus dikelola dan disediakan sebagai kewajiban dan kesediaan untuk menjadi pemerintah yang terbuka. Hal ini yang sering disebut dengan *Open Government Data (OGD)*. Fenomena OGD di seluruh dunia menjadi suatu bahasan yang menarik, terutama pada saat Obama memberikan pidato pertamanya di Gedung Putih pada tahun 2009[1]. Pada gilirannya negara-negara di dunia juga memiliki ketetapan hati untuk melakukan transformasi terhadap pola pemerintahannya dengan menerapkan OGD termasuk Indonesia [1]–[7].

Indonesia mulai mencanangkan OGD sejak pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008 [8], [9]. OGD di Indonesia kemudian lebih dikenal dengan istilah Open Government Indonesia (OGI). Sekalipun demikian, KIP di Indonesia baru benar-benar dimulai implementasinya pada tahun 2010 setelah pengesahan PPID sebagai badan publik pengelola data dan informasi [10]–[12].

Dalam penerapannya, setiap negara dapat memiliki perspektif serta prinsip-prinsip dasar yang pada akhirnya perlu mendapatkan perhatian sebagai wujud komitmen terhadap OGD dan RTI. Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai penelitian yang memberikan fokus pada berbagai ranah penelitian, secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan berbagai tema dan topik tentang OGD [13]–[18]. Maka artikel ini membahas prinsip-prinsip dasar beberapa negara terhadap OGD dan implementasinya dengan memperhatikan konsep OGD yang telah dinyatakan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu perspektif yang digunakan oleh beberapa negara terhadap OGD juga akan dibahas dalam artikel ini.

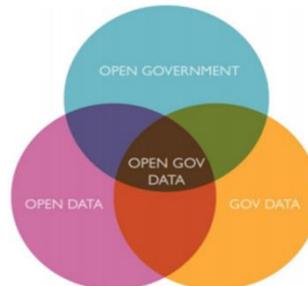
2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai pokok pemandu dalam cara pikir yang mewarnai artikel ini, maka pustaka utama yang dijadikan landasan pijak utama adalah OGD yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dimana seluruh negara di dunia bersepakat dan berserikat di dalam organisasi PBB. Oleh karena itu tinjauan literatur ini terdiri dari pengertian dan prinsip OGD menurut PBB.

2.1 Pengertian OGD Menurut PBB

Di dalam situs resmi PBB serta dokumen yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2013, dikatakan bahwa jika ditinjau dari kalimatnya, yaitu “Open Government Data” maka OGD dapat dibagi ke dalam dua sub kalimat dasar, yaitu (1) Open Data (OD) dan (2) Government Data (GD) [6]. Dari dua sub kalimat tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) OD merupakan sumber utama yaitu berupa data dimana setiap orang dapat menggunakannya untuk tujuan maupun alasan apapun tanpa batasan tertentu
 - 2) GD seringkali disebut pula dengan istilah Public Sector Information (PSI) dimana GD adalah hasil pengolahan data dan informasi yang dipublikasikan melalui suatu badan publik yang sudah disepakati
- Jika kedua sub domain kalimat tersebut digambarkan maka dapat dinyatakan bahwa OGD merupakan perpotongan antara OD dan GD (PSI). Dengan kata lain, OGD merupakan data dan informasi yang diolah, dikelola dan dihasilkan serta dipublikasikan untuk kepentingan semua orang tanpa kecuali.



Gambar 1. OGD sebagai irisan dari OG dan OD (sumber: DPADM/UMU)

2.2 Prinsip-Prinsip OGD Menurut PBB

Jika OGD akan diterapkan, maka OD harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya data yang disediakan untuk setiap orang sebagai haknya harus dapat dipenuhi. Oleh karena itu dalam panduan pengimplementasian OGD, PBB memberikan penjelasan sebagai berikut [19]:

- 1) Data harus dapat diakses melalui Internet
- 2) Data dapat disajikan dan diunggah dalam format yang dapat diakses tanpa mempertimbangkan platform tertentu
- 3) Data berlisensi terbuka dan dimungkinkan untuk dapat digunakan kembali oleh setiap orang sesuai dengan kepentingan mereka
- 4) Data dapat diakses secara bebas dan tidak berbayar serta dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan orang yang menggunakannya
- 5) Data harus transparan
- 6) Data harus akuntabel

Dengan demikian, tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam rangka mengimplementasikan OGD dapat mengikuti tahap-tahap dibawah ini [19]:

- 1) Publikasikan data dan informasi Pemerintah secara online
Pertama, semua data dan informasi yang dipublikasikan harus tersedia secara online. Kedua, informasi yang diunggah memiliki format yang mudah untuk diakses dan digunakan kembali oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, Pemerintah harus memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap data dan informasi yang diberikan. Keempat, Pemerintah wajib menanggapi apapun yang menjadi permintaan dan catatan yang diberikan oleh masyarakat.
- 2) Membangun dan menciptakan lembaga Pemerintah yang memiliki budaya terbuka
Keterbukaan merupakan budaya yang harus didorong dan diupayakan agar Pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Untuk itu hal-hal yang harus dilakukan antara lain:
 - a) Publikasi terhadap perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap upaya Pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya transparansi, kolaborasi serta partisipasi publik
 - b) Setelah tahap implementasi, maka perlu dilakukan tahap evaluasi terhadap penerapan prinsip dan respon Pemerintah. Hasilnya juga harus dipublikasikan
 - c) Melakukan promosi melalui ide-ide inovatif untuk menunjukkan adanya upaya peningkatan dan pengembangan transparansi, kolaborasi dan partisipasi publik.
- 3) Membuat kerangka kebijakan
Kerangka kebijakan ini digunakan untuk memberikan arah dan panduan yang jelas terhadap keberlanjutan implementasi pemerintahan terbuka, dengan memberikan ruang kerjasama dengan berbagai pihak. Harapan yang ingin diraih adalah meningkatkan profesionalitas dalam pemerintahan sehingga implementasi Pemerintahan yang terbuka dapat terus dikembangkan dengan baik di masa mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Di dalam makalah ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi literatur sistematis. Pemahaman tentang studi literatur sistematis ini didasarkan atas tujuan untuk melakukan identifikasi, evaluasi

serta interpretasi terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian maupun fenomena penelitian yang sedang dialami oleh peneliti [20]–[22]. Dalam hal ini prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendefinisikan istilah-istilah yang akan dicari
- 2) Memilih sumber pustaka digital untuk melakukan pencarian
- 3) Mencari apa yang sudah didefinisikan pada poin 1 pada sumber pustaka
- 4) Menganalisa dan membuat ringkasan temuan sesuai dengan apa yang ditemukan dengan cara melakukan ekstraksi temuan referensi

3.1 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian survey ini perlu dilakukan sebagai alat bantu untuk menentukan proses pencarian serta analisa dan rangkuman hasil pencarian yang diperoleh melalui sumber pustaka digital. Pertanyaan-pertanyaan ini berikut ini diharapkan mampu membantu identifikasi terhadap tujuan dari penulisan yaitu mengetahui prinsip-prinsip dasar dan perspektif beberapa negara yang menerapkan OGD.

Untuk itu pertanyaan penelitian yang digunakan dalam survey dengan pendekatan studi literatur sistematis adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja prinsip-prinsip dasar OGD dan bagaimana penerapannya di beberapa negara
- 2) Perspektif apa yang digunakan di dalam implementasi OGD

3.2 Strategi Pencarian Informasi

Untuk memudahkan pencarian informasi yang diinginkan, sumber pustaka digital yang digunakan adalah, antara lain: ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library, Science Direct, Springer Link, ISI Web of Knowledge serta beberapa portal resmi milik pemerintah maupun organisasi resmi yang layak untuk dipercaya.

Adapun beberapa kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: pengertian, makna, arti dari OGD; prinsip, pedoman, landasan, dasar pemikiran, konsep dasar dari OGD; perspektif OGD. Proses ekstraksi dilakukan dengan membuat *check list* dengan kriteria inklusif dan eksklusif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prinsip-prinsip OGD dan Implementasinya Di Beberapa Negara

The World Wide Web Foundation, secara khusus menyoroti pentingnya peran data terbuka di dalam pemerintahan. Dalam situs open data barometer dinyatakan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan data adalah sebagai berikut[23]:

- 1) Data terbuka harus untuk semua orang - hak untuk semua;
- 2) Data terbuka harus menjadi data yang dibutuhkan orang;
- 3) Data terbuka harus dapat diperoleh dengan mudah dan dapat digunakan.

Dari prinsip-prinsip data terbuka inilah diharapkan OGD memenuhi prinsip dasar yaitu [24]: (1) Transparansi, (2) Efisiensi, (3) Partisipasi, (4) Akuntabilitas.

Sedangkan secara umum, sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh 30 advokat OGD pada bulan Desember 2007 di Sebastopol, California Amerika Serikat, telah membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip OGD dimana data pemerintah akan dianggap terbuka jika diunggah secara publik dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip di bawah ini [25]–[28]:

- (1) Lengkap : Semua data publik tersedia. Data publik adalah data yang tidak tunduk pada privasi yang valid, keamanan atau batasan hak istimewa.
- (2) Primer : Data dikumpulkan di sumbernya, dengan tingkat perincian tertinggi, tidak dalam agregat atau formulir yang dimodifikasi.
- (3) Tepat waktu : Data tersedia secepat yang diperlukan untuk mempertahankan nilai data.
- (4) Dapat diakses : Data tersedia untuk rentang pengguna terluas untuk berbagai macam tujuan.
- (5) Dapat diproses oleh mesin platform apapun: Data cukup terstruktur untuk memungkinkan pemrosesan otomatis.
- (6) Non-diskriminatif: Data tersedia untuk siapa saja, tanpa persyaratan pendaftaran.
- (7) Non-kepemilikan: Data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif.
- (8) Bebas lisensi: Data tidak tunduk pada hak cipta, paten, merek dagang atau peraturan rahasia perdagangan. Dengan privasi yang masuk akal, keamanan, dan batasan hak istimewa dapat diizinkan.

Dari prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar penerapan OGD di atas, beberapa negara telah terinspirasi dan mencoba untuk mengimplementasikan OGD dengan segala kemampuan dan ciri atau kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Beberapa negara yang disoroti dalam artikel ini adalah mewakili negara-negara yang telah menerapkan OGD yaitu Inggris, Amerika Serikat, Indonesia, Filipina dan Australia. Adapun sumber-sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dan hasil olah survey dari situs resmi negara-negara tersebut. Hal-hal yang dijadikan sebagai prioritas utama indikatornya adalah (1) ketersediaan data yang selalu ada/eksis; (2) data yang tersedia diunggah secara online; (3) data dapat diakses dalam berbagai format dan diolah oleh mesin berbagai platform; (4) data diakses secara gratis/bebas; (5) lisensi data terbuka; (6) data diperbaharui; (7) data

mudah diperoleh. Dari ketujuh indikator tersebut difokuskan pada aspek: (a) ketersediaan data Pemerintah, (b) ketersediaan data keuangan dan (c) ketersediaan data penduduk.

Bersumber kepada open data barometer 2016, berikut ini adalah ringkasan yang dapat diungkapkan sebagai berikut[24]:

Tabel 1. Implementasi OGD Di Beberapa Negara Menurut Open Data Barometer (Nilai/100)

Negara	1			2			3			4			5			6			7		
	(a)	(b)	(c)																		
Inggris	95	90	90	95	90	90	95	90	90	95	90	90	95	90	90	95	90	90	95	90	90
AS	85	15	75	85	15	75	85	15	75	85	15	75	85	15	75	85	15	75	85	15	75
Australia	5	95	85	5	95	85	5	95	85	5	95	85	5	95	85	5	95	85	5	95	85
Indonesia	5	15	65	5	15	65	5	15	65	5	15	65	5	15	65	5	15	65	5	15	65
Filipina	5	65	15	5	65	15	5	65	15	5	65	15	5	65	15	5	65	15	5	65	15

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip OGD dengan sangat baik. Meskipun Australia masih memikih persoalan dari keterbukaan keuangannya. Jika dilihat dari dua negara Asia seperti Indonesia dan Filipina yang mendapatkan apresiasi baik atas upayanya dalam menerapkan OGD di negaranya, maka hampir setiap aspek dan indikator masih memiliki kendala, sekalipun ada yang sudah mendapatkan apresiasi nilai 65.

Jika kelima negara tersebut diperbandingkan dengan hasil implementasi di setiap regionalnya dari tahun 2013 hingga 2016, maka akan didapatkan informasi bahwa Inggris adalah negara yang paling konsisten di dalam menerapkan OGD. Nilai sempurna tersebut tidak hanya dimenangkan untuk regionalnya saja, yaitu Eropa dan Asia Tengah, melainkan terbaik di seluruh dunia. Sedangkan Filipina serta Indonesia yang berada dalam wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun, sekalipun nilainya masih berada dalam kisaran 40 per 100. Detail data dapat dilihat pada tabel 4.2 yang diolah dari hasil survey open data barometer, di bawah ini[29].

Tabel 2. Penilaian Implementasi OGD

Negara	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Inggris	100,00	100,00	100,00	100,00
Rerata Eropa dan Asia Tengah	50,46	55,22	50,09	43,51
Amerika Serikat	93,38	92,66	81,89	81,62
Rerata Amerika Utara	79,63	83,59	81,12	85,58
Australia	67,68	68,33	67,99	81,15
Rerata Asia Timur dan Pasifik	41,05	38,36	40,24	46,33
Filipina	21,91	23,19	36,94	54,7
Rerata Asia Timur dan Pasifik	41,05	38,36	40,24	46,33
Indonesia	18,66	36,18	31,81	38,35
Rerata Asia Timur dan Pasifik	41,05	38,36	40,24	46,33

Jika dikaitkan dengan konsepsi OGD yang telah didefinisikan oleh The United Nation, maka prinsip-prinsip yang dipegang dan diimplementasikan oleh hampir semua negara yang telah dan terus menerapkan OGD, sudah sesuai. Sekalipun demikian, pada tataran implementasinya perlu terus menerus didukung oleh segenap daya upaya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan OGD dapat tercapai, seperti halnya yang telah diterapkan oleh Inggris.

4.2 Perspektif OGD

Pada gilirannya, ketika OGD diterapkan maka pada tataran implementasi muncul berbagai cara pandang sebagai landasan dan pijakan berpikir untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa referensi yang dapat ditemukan, melihat OGD dari perspektif yang berbeda tetapi relatif memiliki muatan yang senada [30]–[32]. Ketiga artikel tersebut melihat OGD dalam perspektifnya masing-masing sebagai berikut.

Tabel 3. Perspektif OGD

PERSPEKTIF OGD	Peneliti
Birokrasi	Gonzales-Zapata, dkk
Teknologi	
Politik	
Ekonomi	
Teknologi	Yang, dkk
Organisasional	
Legislasi dan Kebijakan	
Lingkungan	
Akuntabilitas	Wirtz, dkk
Teknologi	
Regulasi/Hukum	
Kepercayaan Di Dalam Pemerintahan	

Dari ketiga peneliti tersebut secara prinsip memperlihatkan bahwa OGD tidak dapat dilepaskan dari perspektif Birokrasi/Organisasional yang harus didukung oleh payung hukum dalam bentuk kebijakan, politik, regulasi maupun legislasi. Hal lain yang tak dapat dipisahkan dan menjadi bagian terintegrasi dari OGD adalah teknologi. Kesamaan pandang ini pada akhirnya harus mendapatkan memenuhi tiga pilar OGD yaitu: transparansi, partisipasi dan kolaborasi, yang menjadi tujuan utama penerapan OGD [33]–[35]. Secara khusus, Indonesia menyatakan tiga pilar tujuan OGD adalah transparansi, partisipasi dan inovasi[7]. Hal ini dipertimbangkan bahwa kolaborasi dapat menjadi bagian dari partisipasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pendahuluan hingga pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan OGD yang diperoleh dari studi literatur yang sistematis, adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa prinsip-prinsip dasar OGD yang diteliti ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diterima dan sejalan dengan pemikiran beberapa organisasi penting dunia yang disepakati menjadi delapan prinsip dasar Open Data di dalam OGD. Kedua, bahwa implementasi OGD di beberapa negara telah dilaksanakan dan juga telah mengupayakan implementasinya dengan memegang prinsip-prinsip Open Data. Ketiga, bahwa terdapat berbagai perspektif terhadap OGD, sekalipun demikian tiga hal penting yang disepakati terkait dengan perspektif perspektif Birokrasi/Organisasional, Payung hukum dan Teknologi. Keempat, bahwa pilar utama yang menjadi tujuan penerapan OGD adalah Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi. Untuk Indonesia, tiga pilar utamanya adalah Transparansi, Partisipasi dan Inovasi.

6. SARAN

Dengan menyadari bahwa artikel ini merupakan langkah awal dari penelitian mendalam terhadap OGD, maka beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pertimbangan penelitian di masa datang adalah:

- 1) Pendalaman tentang kerangka kerja OGD di berbagai negara
- 2) Indikator OGD yang diterapkan di berbagai negara
- 3) Penemuan Grounded Theory yang masih belum banyak dimiliki dalam konsep OGD

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Obama, “Transparency and Open Government,” *The White House*, 2009. [Online]. Available: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf . [Accessed: 20-Jan-2013].
- [2] Transparency International Australia, “Open Government And Rights To Information,” Melbourne, 2016.
- [3] Access Info Europe and the Open Knowledge Foundation, “Beyond Access : Open Government Data & the Right to (Re) use Public Information,” Madrid, Spain, 2011.
- [4] N. Helbig, A. M. Cresswell, G. B. Burke, and L. Luna-Reyes, “The Dynamics of Opening Government Data: A White Paper,” New York, 2012.
- [5] Ministry of TEI and India, “Right to Information Act & Open Government Data,” *Ministry of TEI India*, 2015. [Online]. Available: <https://community.data.gov.in/right-to-information-act-open-government-data/>. [Accessed: 15-Feb-2018].
- [6] UN PADM DESA, “Open Government Data And Services,” *UN PADM DESA*, 2013. [Online]. Available: <https://publicadministration.un.org/en/ogd>. [Accessed: 23-Feb-2018].
- [7] Tim Open Government Indonesia, “Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Tahun 2012 Open Government Indonesia: Era Baru Keterbukaan Pemerintah,” Jakarta, 2012.
- [8] P. R. Indonesia, *UU KIP No. 14 Tahun 2008*. Indonesia: www.legalitas.org, 2008.
- [9] D. A. Sastro, M. Yasin, R. Gunawan, R. Julitasari, and T. Bawor, *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010.
- [10] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *PP no. 61 tahun 2010 tentang PPID*. 2010.
- [11] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. 2010.
- [12] Mendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 Tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah*. Indonesia, 2017.
- [13] A. Zuiderwijk, M. Janssen, and S. C. Ronald, “Design principles for improving the process of publishing open data,” *Transform. Gov. People , Process Policy*, vol. 8, no. 2, pp. 185–204, 2014.
- [14] K. Č. Mladen Varga and Tomislav Vračić, “Open Government Data Small Country User’s Perspective Mladen,” in *ICDS 2014 : The Eighth International Conference on Digital Society Open*, 2014, pp. 33–38.
- [15] K. Janssen, “Open Government Data and the Right to Information: Opportunities and Obstacles,” *J. Community Informatics*, vol. 8, no. 2, 2012.
- [16] Retnowati, “Partisipasi Warga Melalui Pusat Informasi Warga (Community Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik Di era OGI (Open Government Indonesia) Studi Pada Kota Pekalongan,” 2017. [Online].

- Available: https://www.academia.edu/34688226/Partisipasi_Warga_Melalui_Pusat_Informasi.
- [17] A. Larquemin, S. Buteau, and J. P. Mukhopadhyay, "Open Government Data and Evidence-based Socio-economic Policy Research in India : An overview," *J. Community Informatics*, vol. 12, pp. 120–147, 2016.
- [18] "Benefits , Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government," *Inf. Syst. Manag. ISSN*, vol. 29, no. 4, pp. 258–268, 2012.
- [19] UN PADM DESA, "Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement," New York, 2013.
- [20] B. Kitchenham, "Procedures for Performing Systematic Reviews," Keele, UK, 2004.
- [21] B. Kitchenham and C. Ebse, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering Executive summary," 2007.
- [22] Software Engineering Group, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," UK, 2007.
- [23] The World Wide Web, "Open Government Data – World Wide Web Foundation," *Global Report*, 2016. [Online]. Available: <https://opendatabarometer.org/4thedition/report/>.
- [24] The World Wide Web, "Global Report _ Open Data Barometer," 2016. [Online]. Available: <https://webfoundation.org/projects/ogd/>.
- [25] O. G. W. Group, "8 Principles of Open Government Data," California, USA, 2007.
- [26] Open Government Working Group, "The Annotated 8 Principles of Open Government Data (Open Gov Data)," 2007.
- [27] Open Government Working Group, "8 Principles of Open Government Data," *The United Nation*, 2007. [Online]. Available: <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN042947.pdf>.
- [28] B. Ubaldi, "OECD Working Papers on Public: Open Government Data TOWARDS EMPIRICAL ANALYSIS OF OPEN GOVERNMENT DATA INITIATIVES," 2013.
- [29] The World Wide Web, "Compare Countries _ Open Data Barometer," 2016. [Online]. Available: https://opendatabarometer.org/4thedition/compare/?_year=2016&indicator=ODB&open=GBR.
- [30] F. Gonzalez-zapata and R. Heeks, "The Multiple Meanings of Open Government Data : Understanding Different Stakeholders and Their Perspectives," *Gov. Inf. Quar*, vol. 32, no. 4, pp. 441–452, 2015.
- [31] T. Yang, "To open or not to open ? Determinants of open government data," *J. Inf. Sci.*, no. 1, pp. 1–17, 2015.
- [32] B. W. Wirtz, S. Birkmeyer, B. W. Wirtz, and S. Birkmeyer, "Open Government : Origin , Development , and Conceptual Perspectives Open Government : Origin , Development , and Conceptual Perspectives," *Int. J. Public Adm.*, no. March, pp. 37–41, 2015.
- [33] W. R. Ginsberg, "The Obama Administration ' s Open Government Initiative : Issues for Congress," 2011.
- [34] D. S. Sayogo, T. A. Pardo, and M. Cook, "A Framework for Benchmarking Open Government Data Efforts," in *2014 47th Hawaii International Conference on System Science*, 2014, no. May 2010.
- [35] B. W. Wirtz, J. C. Weyerer, and M. Ro, "Open government and citizen participation : an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data," *Int. Rev. Adm. Sci.*, 2017.